

Tambang Picu Bara Konflik Padang Batung

fanzine

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA



PARADOKS DAMAI
BOP

TEMUKAN INFORMASI DAN BERITA ANALISIS MENDALAM HANYA DI
WEBSITE BERITA NASIONAL :

aktual

TERHANGAT TERPERCAYA

MENYAJIKAN INFORMASI, PERISTIWA, DAN ANALISA POLITIK,
HUKUM, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA SETIAP SAAT
MEMENUHI KEBUTUHAN INFORMASI ANDA GUNA MEMBANTU
PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG TEPAT DAN STRATEGIS

PARTNERSHIP : 0813-1019-7365

Pengamat Kritis Gaji DPR
Masih Rp65 Juta Meskipun
Tuntutan Demonstrasi Besar
Disepakati

Oleh Eka Permadi
WIB

Was-was Antiklimaks Kasus
Nadiem Makarim di Kejagung

Abal-Abal Tanggapan
Kantong Gaji
Rincian
7 September 2018



Edisi ini kami membuka dengan Laporan Utama tentang gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon yang bukan sekadar tragedi, tetapi juga menguji arah politik Indonesia dalam Board of Peace. Di tengah eskalasi konflik, pertanyaan mendasar muncul: sejauh mana keterlibatan Indonesia memberi dampak nyata bagi perdamaian, atau justru menempatkan prajurit dalam risiko yang kian tinggi.

Pada Laporan Khusus, polemik pengadaan motor listrik BGN kami hadirkan melalui tajuk “Efisiensi Jadi Slogan, Motor MBG jadi Beban?”. Isu ini memperlihatkan benturan antara ambisi program dan transparansi kebijakan.

Di rubrik Analisis, kami mengulas isu reshuffle kabinet di tengah tekanan global.

Rubrik Nasional menyoroti vonis lepas terdakwa KM 50 serta kritik terhadap peradilan militer kasus Andrie Yunus yang masih menyisakan tanda tanya besar soal aktor utama. Dari daerah, konflik tambang di Padang Batung memperlihatkan bagaimana sengketa lahan berubah menjadi bara sosial. Sementara Dunia Aktual mengulas gencatan senjata Iran–AS–Israel yang masih rapuh. Kami tutup dengan Oase: seruan solidaritas umat tanpa sekat, mengingatkan bahwa di tengah konflik global, persatuan tetap menjadi fondasi utama.

Daftar Isi

Laporan Utama

- Gugurnya Tiga Prajurit Uji Arah Politik BoP 4
- Prabowo Hitung Ulang Langkah Indonesia di BoP 8
- JK: Indonesia Harus Tegas, BoP Jangan Sekadar Forum 10

Laporan Khusus

- Efisiensi Jadi Slogan, Motor MBG Jadi Beban? 12
- Video Viral Motor MBG Jadi Polemik, DPR Minta Klarifikasi BGN 14

Analisis

- Reshuffle Kabinet di Tengah Tekanan Global 16

Ekonomi

- WIKI Rugi Triliunan Rupiah di 2025, Akibat Kereta Cepat? 18

Wawancara

- Zakat untuk MBG? Baznas: Jangan Campur Dana Umat dengan Program Negara 20

Nasional

- Peradilan Militer Andrie Yunus Dikritik, Dalang Tak Kunjung Terungkap 22
- Terdakwa KM 50 Divonis Lepas, PUI: Keadilan Masih Hidup atau Sudah Mati? 23

Daerah

- Tambang Picu Bara Konflik Padang Batung 24

Dunia Aktual

- Gencatan Senjata Iran–AS–Israel Masih Rapuh 26
- Diplomasi Damai Iran–AS Gagal 27

Oase

- Solidaritas Tanpa Sekat: Umat Islam Mesti Bersatu dalam Naungan Persatuan 29

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

Direktur Utama: Andy Abdul Hamid **Pemimpin Umum:** Tino Oktaviano **Pimpinan Redaksi:** Rizal Maulana Malik **Redaktur Liputan Khusus:** Eka Permadhi, Eroby Jawi Fahmi **Redaktur Fanzine:** Andry Haryanto, Achmat **Redaktur Medsos:** Al Jalli **Redaktur Videografis:** Saiful, Dany Candra Setiadi **Redaktur:** Indra Bonaparte **Reporter:** Rizky Zulkarnain, Sandi Setyawan, Eroby Jawi Fahmi, Achmat, Ricky Setiawan, Muhammad Khamsi (Pantura Pekalongan), Edy Gustan (Lombok) **Kontributor:** Nugroho Sentoso, Halimansyah, Danang Wibowo, Hary Fauzan (Bekasi), Muhammad Aderman (Riau), Ferry Supto (Batam) **Head Marketing:** Almalludin Sudrajat Muchlica **IT:** Rohadi M Raja **Legal Officer:** DAAR AFKAR & CO. LAWYERS

Alamat Redaksi: Capro Building Jl. Prof DR Soepomo No. 73B Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan **Telepon** (021) 83706200 **E-mail:** redaksi@Aktual.com iklan@Aktual.com

BOARD of



BOARD
PEACE

BOARD
PEACE

INDONESIA

PEACE

LAPORAN UTAMA

Gugurnya Tiga Prajurit Uji Arah Politik BoP



Foto: presiden.go.id

Desakan agar Indonesia meninjau ulang keterlibatannya dalam misi penjaga perdamaian menguat setelah gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi UNIFIL pada 29–30 Maret 2026. Hasil investigasi awal PBB mengungkap bahwa insiden pertama diduga berasal dari proyektil tank Merkava milik militer zionis Israel, sementara kejadian berikutnya terkait ledakan bom rakitan di jalur konvoi.

Situasi ini memicu perdebatan baru soal posisi Indonesia di Board of

Peace (BoP), di tengah eskalasi konflik Lebanon Selatan yang kian intens dan berisiko bagi pasukan penjaga perdamaian.



Dorongan untuk keluar dari BoP pun mencuat dari berbagai kalangan. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan ulang manfaat keikutsertaan Indonesia.

“Jadi saya bayangkan kalau dia di bawah BOP yang dipimpin oleh Presiden Amerika Donald Trump seperti apa dia. Sehingga ini akan

mubazir kalau kita berada di wilayah BOP begitu,” kata Hasanuddin di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Politikus PDIP ini menilai sikap agresor Israel yang kerap mengabaikan resolusi PBB menjadi indikator bahwa forum seperti BoP berpotensi tidak efektif.

“Jangankan di BOP, dia seanak perutnya saja. Ya sekarang di bawah PBB saja dia sudah tidak taat. Daripada kita repot nanti,” imbuhnya.

Namun, pandangan berbeda datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang menilai insiden tersebut tidak berkaitan langsung dengan keanggotaan Indonesia di BoP.

“Tidak ada urusannya dengan BOP. Ini mandat PBB. Jadi apa yang dilakukan di sana adalah tugas perdamaian dunia,” ujarnya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI ini juga menegaskan, bahwa serangan terhadap pasukan perdamaian mencerminkan pola konflik yang lebih luas.

“Kita semua tahu bahwa ini perbuatan Israel yang tidak memandang kemanusiaan dan perdamaian. Siapa pun yang menghalangi akan dihajar,” kata JK.

Di sisi lain, tekanan juga datang dari kalangan ulama dan parlemen. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim,



Foto: mu.or.id

menilai serangan terhadap pasukan perdamaian sebagai pelanggaran serius hukum internasional.

“Pasukan perdamaian hadir untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik, bukan untuk menjadi sasaran kekerasan. Oleh karena itu, serangan terhadap mereka adalah pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan aspek keselamatan prajurit sebagai pertimbangan utama.

“Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut karena ini adalah daerah yang membahayakan,” katanya.

Rizky Zulkarnain, Erobey Jawi Fahmi, Eka Permadi, Achmad



Foto: ksp.go.id

Prabowo Hitung Ulang Langkah Indonesia di BoP

Desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) terus menguat di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Sejumlah kelompok, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), menilai keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut tidak lagi relevan dengan realitas geopolitik yang kian brutal.

Kritik juga diarahkan pada peran Amerika Serikat sebagai penggagas BoP yang dinilai justru memperkeruh konflik, bukan meredamnya. Tekanan publik itu kemudian bergulir ke Istana, memaksa pemerintah memberi respons atas posisi Indonesia di forum internasional tersebut.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menutup mata terhadap desakan tersebut. Ia memastikan seluruh masukan, termasuk dari MUI, tengah dicermati secara serius.

“Presiden menyimak dengan seksama, memperhatikan dengan seksama tentang hal ini dan dia akan

terus mencermati keadaan di Timur Tengah,” ujar Muzani. Namun, pemerintah belum mengambil keputusan final. Opsi keluar tetap terbuka, tetapi tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa.

Sikap hati-hati itu juga tercermin dalam pernyataan pemerintah yang menyebut keanggotaan Indonesia di BoP bersifat fleksibel. “Kita bisa saja kapan saja bisa keluar, tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama,” kata Muzani.

Di saat yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan

bahwa seluruh pembahasan BoP untuk sementara ditunda, karena perhatian dunia kini tersedot pada eskalasi konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Dengan kata lain, di tengah tekanan publik yang kian keras, pemerintah memilih menahan langkah—membaca arah konflik, sembari menjaga ruang manuver diplomasi Indonesia agar tidak terjebak dalam keputusan yang prematur.



Tino Oktaviano, Achmat, Rizky Zulkarnain

JK: Indonesia Harus Tegas, BoP Jangan Sekadar Forum



Foto: UN Photo

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menegaskan pentingnya sikap tegas Indonesia dalam merespons konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Menurutnya, posisi Indonesia tidak boleh abu-abu, terutama sebagai

negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

“Sebagai penduduk Islam terbesar. Mesti ada keberpihakan. Masa kita berpihak ke Israel? Masa kita berpihak pada Amerika yang menyerang?” ujarnya kepada wartawan di kediamannya, Jumat (6/3/2026).

Dalam pandangannya, keberpihakan tersebut bukan semata soal sentimen, melainkan logika politik luar negeri yang berpijak pada prinsip keadilan. JK bahkan secara eksplisit menyebut Indonesia seharusnya berpihak kepada Iran sebagai pihak yang diserang, meskipun terdapat perbedaan mazhab keagamaan.

“Logikanya kita harus berpihak dong kepada negara Iran itu, walaupun mungkin berbeda Syiah,” katanya, menegaskan bahwa perbedaan internal umat tidak boleh mengaburkan posisi dalam konflik internasional.

Lebih jauh, JK menyoroti peran Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dinilainya harus lebih dari sekadar simbol keanggotaan. Ia mendorong agar forum tersebut dimanfaatkan untuk meredakan konflik yang tengah berlangsung, termasuk dengan mengusulkan langkah konkret kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Jadi harus ditagih atau diusulkan Trump agar memanfaatkan Board of Peace ini untuk mengatasi kericuhan ini semua, perang ini,” ujarnya.

JK pun mengingatkan, jika BoP tidak mampu berfungsi dalam situasi krisis seperti ini, maka keikutsertaan

Indonesia patut dipertanyakan.

“Kalau tidak bisa, ya buat apa Indonesia jadi anggota? Kalau hal ini saja tidak bisa diatasi oleh Board of Peace itu,” sambungnya.

Pemerintah Evaluasi, Pasukan Tetap Bertahan

Di sisi lain, pemerintah memastikan tidak akan menarik pasukan TNI dari United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), meski evaluasi terus berjalan pascagugurnya tiga prajurit. Sekretaris Kabinet

Teddy Indra Wijaya menegaskan,

“Tidak ada untuk ke situ. Evaluasi tetap berjalan, evaluasi ke dalam dan keluar,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat

(10/4/2026).

Ia menambahkan, pemerintah tetap berpegang pada mandat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia.

“Jadi saya rasa itu sudah sangat tegas disampaikan bahwa sesuai Undang-Undang pembukaan alinea empat, menertibkan ketertiban dunia,” ujarnya.

“Jadi kita mengirim pasukan di sana untuk menjaga perdamaian dan kita tegas terhadap evaluasi yang ada seperti itu ya,” sambungnya.

Tino Oktaviano, Achmat, Rizky Zulkarnain

“Kalau tidak bisa, ya buat apa Indonesia jadi anggota? Kalau hal ini saja tidak bisa diatasi oleh Board of Peace itu,”

Efisiensi Jadi Slogan, Motor MBG Jadi Beban?

Rencana pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam di ruang publik. Isu ini mencuat setelah beredarnya video yang menampilkan ribuan motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN), bahkan disebut mencapai 70 ribu unit.

BGN menyatakan pengadaan motor tersebut memang ada dalam perencanaan, namun dengan jumlah berbeda. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut realisasi mencapai 21.801 unit dari target sekitar 25 ribu unit.

Motor tersebut, menurutnya, diperuntukkan bagi operasional SPPG di wilayah sulit dijangkau.

“Program ini kan menjangkau daerah-daerah yang akan sangat sulit, menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang memang hanya bisa dengan motor,” kata Dadan, Rabu (8/4/2026).

Ia juga mengklaim harga pembelian berada di bawah pasar. “Dan realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800 dan sudah masuk ke anggaran 2025,” ujarnya. Meski demikian, ia memastikan tidak ada pengadaan tambahan pada 2026.



Foto: Aktual/NO

Perbedaan narasi antara temuan di lapangan dan penjelasan resmi ini memicu kritik dari DPR. Anggota Komisi IX, Neng Eem Marhamah Zulfa, menekankan pentingnya transparansi dalam program dengan anggaran besar tersebut.

“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya,” ujar Neng Eem.

Neng mengingatkan bahwa keterbukaan bukan sekadar formalitas, melainkan upaya menjaga kepercayaan publik.

“Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel di hadapan publik,” tegasnya.

Kritik yang lebih tajam datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, yang menilai pengadaan tersebut berpotensi bermasalah dalam tata kelola anggaran.

“Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan

oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara. Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah,” kata Charles, Rabu (8/4/2026).

Politikus PDIP ini bahkan menyebut kebijakan ini berpotensi menjadi pemborosan di tengah tekanan fiskal.

“Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas.

Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek,” ujarnya.

Charles menegaskan fokus utama program seharusnya pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang dinilai belum memiliki urgensi jelas.

“Fokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada. Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan,” katanya.

Ia memastikan DPR akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban. “Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas,” ucapnya.

Sorotan juga datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengaku pernah menolak pengajuan serupa.

“Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi,” kata Purbaya.

Ia menekankan anggaran MBG seharusnya difokuskan pada penyediaan makanan, bukan pengadaan sarana yang bisa dialihkan pembiayaannya.

Rizky Zulkarnain, Achmad, Tino Oktaviano



Video Viral Motor MBG Jadi Polemik, DPR Minta Klarifikasi BGN



Foto: fraksi-pkb.com

Polemik pengadaan 25.000 unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan pihaknya membuka opsi memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengklarifikasi pengadaan tersebut.

Menurut Neng Eem, publik berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggaran motor listrik tersebut. Ia menilai transparansi diperlukan untuk mencegah polemik berkepanjangan dan menjaga kredibilitas program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.

Isu ini mencuat setelah BGN

mengungkapkan bahwa dari total 25.000 unit motor listrik yang dipesan pada 2025, sebanyak 21.801 unit belum didistribusikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendala administrasi terkait status Barang Milik Negara (BMN) disebut menjadi penyebab utama tertahannya distribusi.

Neng Eem menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Ia juga menilai keterbukaan informasi penting untuk menghindari spekulasi publik yang berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap program MBG.

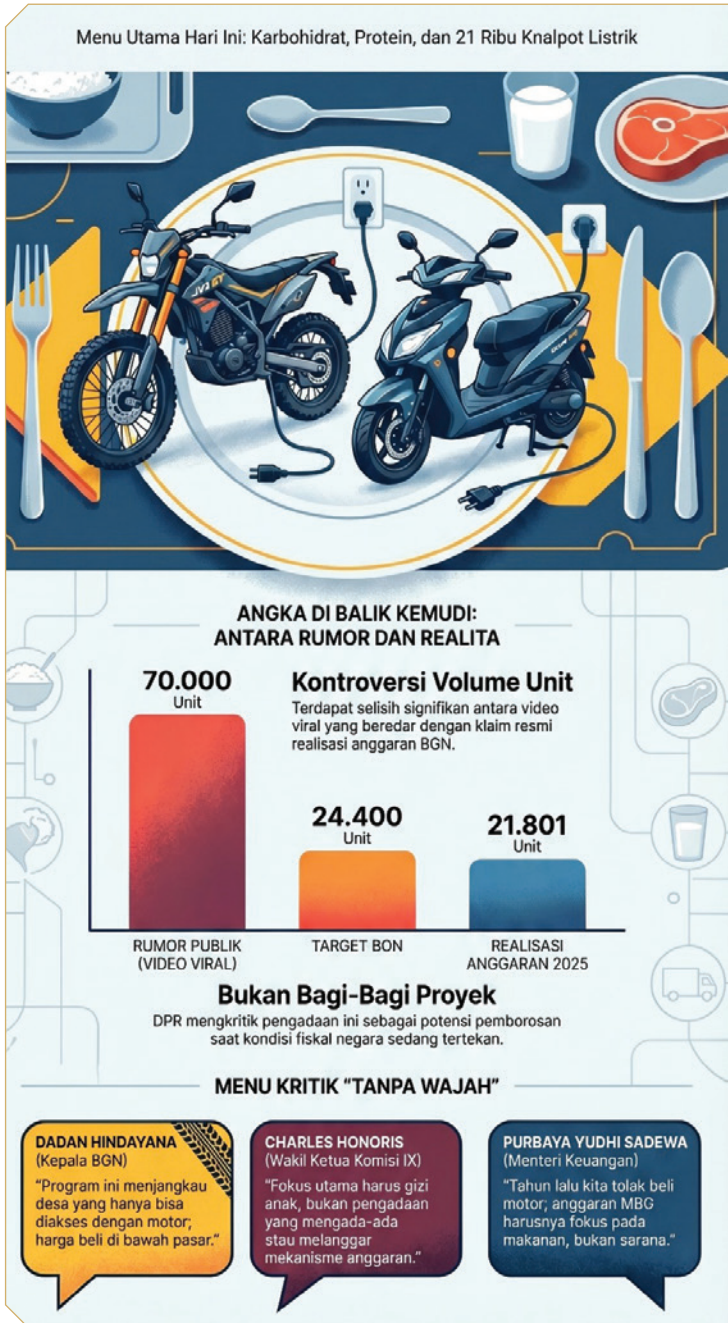
Sementara itu, Komisi IX DPR RI akan mencermati perkembangan proses administrasi BMN serta

distribusi kendaraan tersebut. DPR berharap penjelasan resmi dari BGN dapat meluruskan simpang siur informasi terkait urgensi penggunaan motor listrik dalam operasional distribusi gizi.

Polemik semakin ramai setelah video pengiriman motor listrik viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat ribuan motor berbalut plastik dengan stiker BGN dan disebut akan didistribusikan ke berbagai daerah, termasuk Jawa Barat.

Namun, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Regional Bandung, Ramzi, mengaku belum menerima informasi resmi terkait pengadaan maupun distribusi kendaraan tersebut. Ia menyatakan pihaknya hanya mengetahui informasi tersebut dari media sosial dan belum dapat memastikan kebenarannya.

Eka Permadhi



Reshuffle Kabinet di Tengah Tekanan Global

Isu reshuffle kabinet kembali beredar di tengah situasi global yang menuntut kepastian arah. Namun alih-alih memberi kejelasan, Istana justru merespons dengan pernyataan singkat dan menggantung. Ketika dunia bergerak cepat, komunikasi yang setengah terbuka justru berisiko memperlebar jarak antara kebijakan dan kepercayaan publik.

Pada Selasa, 7 April 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, “Tunggu saja,” lalu menambahkan, “Nanti Bapak Presiden akan menceritakan”. Kalimat dalam konteks menjawab pertanyaan awak media terkait desas-desus pergantian kabinet itu terdengar sederhana, tetapi implikasinya tidak ringan.

Dalam situasi global yang sedang bergejolak, dari konflik geopolitik hingga tekanan ekonomi lintas negara, pernyataan yang menggantung justru membuka ruang tafsir yang luas, termasuk bagi pelaku pasar dan investor yang sensitif terhadap arah kebijakan.

Padahal, dalam konteks ekonomi global hari ini, stabilitas tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh persepsi terhadap kepastian. Ketika rantai pasok terganggu, harga energi berfluktuasi, dan nilai tukar rentan bergerak, pemerintah dituntut menunjukkan soliditas. Reshuffle kabinet, dalam kerangka ini, diharapkan bukan sekadar agenda politik internal. Namun pesan tentang seberapa siap pemerintah menata ulang mesin kerjanya untuk merespons tekanan eksternal.

Di sisi lain, dorongan evaluasi kabinet memang tidak datang dari spekulasi semata. Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menyatakan, “Di tengah ketidakpastian global, kabinet Prabowo Subianto tak cukup hanya menjalankan tugas yang rutinitas.” Ia menambahkan, “Para menteri yang hanya menunggu petunjuk sudah saatnya diganti” (detikNews, Selasa, 31 Maret 2026). Kritik ini menegaskan bahwa persoalan reshuffle bukan sekadar siapa digeser, melainkan bagaimana kualitas respons pemerintah terhadap situasi krisis.

Nada serupa datang dari analis hukum tata negara Feri Amsari. Ia mengatakan,



“Presiden harus jadi pemimpin yang dapat memilih kualitas kabinetnya. Sayangnya, Presiden menambah jumlah menteri bukan memperkuat kualitasnya.” Ia bahkan mengingatkan, “Dari sikap Presiden dalam menghadapi bencana lokal, nasional, dan saat ini global, kita tahu bahwa Presiden membutuhkan orang-orang berkualitas bukan anak kemarin sore tanpa pengalaman dan pengetahuan dalam kabinetnya” (detikNews, Selasa, 31 Maret 2026). Kritik ini bukan hanya soal komposisi kabinet, tetapi juga tentang standar kepemimpinan di tengah tekanan berlapis.

Sementara itu, sikap resmi pemerintah sebelumnya justru cenderung meredam isu. Pada Jumat, 30 Januari 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Bahkan, saat itu, ia menyebut belum ada menteri yang kerjanya dinilai bermasalah.

Publik dihadapkan pada dua arus yang berbeda: kritik yang menuntut evaluasi nyata, dan pernyataan resmi yang cenderung menahan perubahan. Ketika keduanya tidak dipertemukan dalam penjelasan yang transparan, reshuffle berisiko dipersepsikan bukan sebagai langkah strategis, melainkan sekadar manuver politik.

Lebih jauh, konteks geopolitik membuat setiap keputusan menjadi lebih sensitif. Konflik yang berkepanjangan di sejumlah kawasan

tidak hanya berdampak pada stabilitas global, tetapi juga merembes ke sektor energi, perdagangan, dan investasi. Negara-negara dengan respons cepat dan kabinet yang solid cenderung lebih mampu menjaga stabilitas domestik. Sebaliknya, negara yang tampak ragu atau tidak konsisten dalam pengambilan keputusan akan lebih mudah terkena imbas ketidakpastian global.

Karena itu, reshuffle, jika benar akan dilakukan, harus keluar dari pola lama; tertutup, spekulatif, dan minim penjelasan. Publik berhak mengetahui apa ukuran evaluasi, sektor mana yang dinilai lemah, dan arah perbaikan apa yang hendak ditempuh. Tanpa itu, pergantian menteri hanya akan menjadi rotasi nama, bukan transformasi kinerja.

Dalam situasi global yang menekan, kabinet tidak cukup diisi oleh figur yang aman secara politik. Tapi diisi oleh orang yang mampu membaca krisis, bergerak cepat, dan mengambil keputusan berbasis kepentingan publik. Jika reshuffle hanya menjadi kompromi kekuasaan, maka ia tidak akan memperkuat pemerintah, justru memperlemah daya tahannya menghadapi tekanan global.

Yang dipertaruhkan bukan sekadar susunan kabinet, melainkan kredibilitas kepemimpinan itu sendiri. Yang dibutuhkan adalah kepastian arah, jelas, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Andry Haryanto

WIKA Rugi Triliunan Rupiah di 2025, Akibat Kereta Cepat?

Kerugian mencapai triliunan rupiah ternyata tidak hanya dialami PT PP (Persero) Tbk di 2025. Perusahaan BUMN Karya lainnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mencatat kerugian jumbo pada tahun lalu.

Perusahaan BUMN konstruksi tersebut mencatat rugi bersih Rp9,75 triliun sepanjang 2025, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,27 triliun, atau melonjak tajam 328,3%.

Kerugian disebabkan beberapa hal, seperti bunga dan beban lain-lain, serta beban pokok pendapatan yang tinggi. Selain itu, proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dinilai berkontribusi pada beban utang dan kerugian perusahaan.

Melansir laporan keuangan 2025 yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), WIKA membukukan pendapatan neto sebesar Rp13,32 triliun. Angka ini turun 30,74% (year on year/YoY).

Pendapatan utama perseroan dari segmen infrastruktur dan gedung yang

memiliki pangsa 42,31%, terpengkas 40,12% (YoY) menjadi Rp5,64 triliun.

Pendapatan dari segmen industri juga turun 29,52% (YoY) menjadi Rp3,73 triliun. Pendapatan dari segmen energi dan industrial plant turun 5,73% (YoY) menjadi Rp3,14 triliun, segmen hotel juga susut 66% (YoY) menjadi Rp298,60 miliar.

Adapun pendapatan perseroan dari segmen realty dan properti tumbuh 68,71% (YoY) menjadi Rp276,55 miliar dan dari segmen investasi menyumbang Rp236,71 miliar atau naik 52,91% (YoY).

Meski segmen ini naik dua digit, pangasanya yang masing-masing hanya 2,1% dan 1,8% dari tota pendapatan perseroan tak mampu menopang total pendapatan.

Di sisi lain, beban pokok pendapatan WIKA sepanjang 2025 mencapai Rp12,19 triliun, turun 31,18% (YoY). Beban terberat berasal dari segmen infrastruktur dan gedung dengan nilai Rp5,21 triliun atau turun 40,88% (YoY), lalu segmen industri dengan beban Rp3,45 triliun atau turun 29,57% (YoY).

Bila menghitung selisih pendapatan neto dan beban pokok pendapatan itu, didapatkan laba bruto WIKA sepanjang 2025 mencapai Rp1,13 triliun. Angka ini merosot 25,77% (YoY) dari laba bruto 2024 sebesar Rp1,52 triliun.

Selanjutnya, WIKA juga mencatat beberapa pos beban lainnya, seperti beban usaha Rp5,41 triliun, beban keuangan



Rp2,97 triliun, hingga beban rugi ventura bersama senilai Rp1,44 triliun.

Alhasil, WIKA mencatat rugi neto sebesar Rp10,13 triliun. Rugi neto ini melejit 303,18% (YoY) dibanding Rp2,51 triliun pada periode 2024.

Dari sisi bottom line, rugi neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau rugi bersih tercatat sebesar Rp9,71 triliun, juga melebar 328,31% (YoY) atau lebih dari 3 kali lipat dari rugi bersih 2024 sebesar Rp2,27 triliun.

Sedangkan dari sisi neraca keuangan, WIKA mencatat total aset sebesar Rp50,15 triliun atau turun 21% (YoY). Penurunan ini didorong oleh ekuitas perseroan yang terpangkas 85,8% (YoY) menjadi Rp1,68 triliun.

Sementara, total liabilitas tercatat turun 6,07% (YoY) menjadi Rp48,46 triliun. Postur utang perseroan terdiri dari liabilitas jangka panjang Rp32,95 triliun dan jangka pendek Rp15,51 triliun. Keduanya masing-masing naik 1,13% (YoY) dan turun 18,41% (YoY).

Di lantai bursa, saham WIKA telah disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 18 Februari 2025. Harga saham WIKA tertahan di level Rp204 sejak suspensi hingga sekarang.

Corporate Secretary WIKA, Ngatemin, menyampaikan, perseroan tetap fokus meningkatkan kinerja operasi dan memperbaiki struktur modalnya, dengan 8 stream penyehatan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

“Di tahun ini, perseroan akan terus

berupaya melakukan restrukturisasi komprehensif untuk menurunkan beban keuangan atas penugasan yang dikerjakan dan divestasi atas aset yang belum dapat memberikan laba bagi perseroan,” jelas Ngatemin, dalam keterangan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kereta Cepat Jadi Beban

Diketahui, WIKA memiliki keterlibatan ganda yang signifikan di proyek Kereta Cepat Whoosh. Saham WIKA di proyek ini menanggung triple burden (investor, kontraktor, kreditor), yang berdampak negatif terhadap laporan keuangan dengan kerugian triliunan rupiah akibat cost overrun.

WIKA merupakan salah satu pemegang saham utama di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan sekitar 33,36% hingga 38%. PSBI sendiri menguasai 60% saham di PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). WIKA menanamkan modal sekitar Rp6,1 triliun dalam proyek ini.

Adapun posisi sebagai kontraktor, WIKA memegang porsi sekitar 25% dalam pekerjaan konstruksi, namun masih memiliki piutang cost overrun lebih dari Rp5 triliun yang belum dibayar oleh KCIC.

Akibat keterlibatan ini, WIKA mencatat rugi bersih yang besar, termasuk rugi Rp7,12 triliun pada tahun 2023 dan berlanjut hingga September 2025.

Erobby Jawi Fahmi

Rizaluddin Kurniawan, Pimpinan Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Zakat untuk MBG?

Baznas: Jangan Campur Dana Umat dengan Program Negara



foto: baznas.go.id

Perbincangan soal dana zakat yang disebut-sebut mengalir ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik. Narasi ini berkembang cepat di media sosial dan memunculkan pertanyaan soal akuntabilitas serta batas penggunaan dana umat.

Polemik soal zakat dan MBG menunjukkan satu hal, bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat tetap menjadi isu sensitif. Baznas memastikan, batas antara kewajiban agama dan program negara tidak bisa dicampur.

Di tengah derasnya informasi, publik diingatkan untuk memilah, sementara pengelola zakat dituntut tetap transparan. Sebab pada akhirnya, zakat bukan sekadar angka, melainkan amanah yang harus sampai kepada mereka yang berhak.

Dalam perbincangan dengan **Aktual.com**, Pimpinan Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Rizaluddin Kurniawan, meluruskan isu tersebut sekaligus menjelaskan mekanisme, dasar hukum, serta prinsip pengelolaan zakat agar tetap sesuai

syariat dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Isu yang berkembang menyebut dana zakat digunakan untuk program MBG. Bagaimana sebenarnya posisi Baznas?

Tidak benar dana zakat digunakan untuk mendanai MBG. Sampai saat ini tidak ada satu rupiah pun dari Baznas pusat maupun daerah untuk program tersebut.

Jadi secara aturan memang tidak memungkinkan?

Betul, zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan golongan yang ditetapkan dalam syariat. Di luar itu tidak diperbolehkan dalam kondisi apa pun.

Delapan golongan itu bisa dijelaskan?

Fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, ibnu sabil, dan fisabilillah. Itu sudah jelas dalam Al-Qur'an dan tidak bisa ditambah atau dikurangi.

Lalu bagaimana muncul narasi bahwa zakat bisa digunakan untuk program pemerintah seperti MBG?

Itu kemungkinan besar disinformasi yang berkembang di publik. MBG adalah program pemerintah yang

pendanaannya dari APBN, bukan dari dana zakat.

Apakah Baznas melihat isu ini berdampak pada kepercayaan publik?

Kami melihatnya sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Artinya publik ingin dana umat tetap dijaga sesuai syariat.

Dalam pengelolaan zakat, apa prinsip yang dipegang Baznas?

Kami berpegang pada tiga prinsip: aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Artinya sesuai syariat, sesuai aturan negara, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana memastikan dana zakat benar-benar dikelola secara transparan?

Kami diaudit secara berlapis, mulai dari internal, akuntan publik, hingga audit syariah oleh Kementerian Agama. Selain itu, pengelolaan juga diawasi oleh DPR secara berkala.

Berapa besar potensi zakat di Indonesia saat ini?

Potensi zakat nasional mencapai sekitar Rp372 triliun. Dari jumlah itu, zakat profesi berkontribusi sekitar Rp120 triliun per tahun.

Menariknya, generasi muda disebut aktif berzakat. Apa benar?

Sekitar 70 persen donatur Baznas berasal dari usia 18 hingga 35 tahun. Ini menunjukkan budaya berbagi di kalangan generasi muda cukup tinggi.

Bagaimana Baznas

menyesuaikan dengan generasi digital?

Kami menyediakan lebih dari 120 kanal digital untuk memudahkan pembayaran zakat. Mulai dari e-commerce, e-wallet, hingga aplikasi resmi Baznas.

Banyak yang khawatir dana zakat bisa ditarik ke luar kepentingan syariat. Apakah itu mungkin?

Tidak mungkin, karena penggunaan zakat sudah diatur ketat dalam syariat dan regulasi negara. Setiap penyaluran harus melalui verifikasi dan pengawasan berlapis.

Jika ada pihak mencoba mengarahkan dana zakat ke luar ketentuan, bagaimana respon Baznas?

Secara sistem tidak akan lolos karena ada audit di setiap tahap. Kami memastikan semua penggunaan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam konteks isu MBG ini, apa yang paling ingin diluruskan kepada publik?

Yang paling penting, zakat tidak bisa digunakan sembarangan. Tidak ada dana zakat yang dialokasikan untuk MBG.

Apa pesan untuk masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu seperti ini?

Pastikan informasi berasal dari sumber resmi dan bisa diverifikasi. Jangan langsung percaya pada narasi yang belum jelas kebenarannya.

Rizal Maulana Malik

Peradilan Militer Andrie Yunus Dikritik, Dalang Tak Kunjung Terungkap



Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, kini memasuki babak baru. Empat anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkara resmi dilimpahkan ke Oditur Militer untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Militer. Namun, di tengah klaim penegakan hukum yang disebut “profesional, terbuka, dan akuntabel”, publik justru dihadapkan pada pertanyaan sejauh mana transparansi proses ini, dan siapa sebenarnya dalang di balik penyerangan?

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menyatakan pelimpahan perkara dilakukan pada Selasa 7 April 2026, setelah seluruh proses penyidikan rampung.

“Pelimpahan ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam penegakan hukum yang profesional, terbuka, dan akuntabel,” terang Aulia, Selasa (7/4/2026) malam.

Namun, proses yang berlangsung cepat—kurang dari satu bulan—dan tertutup justru memantik kecurigaan. Apalagi, sejak awal kasus ini dinilai bukan sekadar tindak kriminal biasa. Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan serangan terhadap Andrie memiliki dimensi pelanggaran HAM.

“Ini bukan sekadar kriminalitas, tetapi sudah masuk dalam kategori pelanggaran HAM,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Di sisi lain, Komnas HAM mengindikasikan bahwa pelaku tidak berhenti pada empat prajurit yang kini menjadi tersangka.

“Kita masih berkeyakinan di luar empat orang ini ada pihak lain,” kata Komisioner Saurlin Siagian, Rabu (8/4/2026).

Komnas HAM juga menyatakan masih mengumpulkan fakta dan melakukan pencocokan data terhadap berbagai informasi, termasuk kemungkinan meminta keterangan tambahan dari para pihak terkait.

Sementara itu, empat tersangka berinisial NDP, SL, BHW, dan ES telah dilimpahkan bersama barang bukti untuk diperiksa kelengkapan berkas sebelum disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Eka Permadhi

Terdakwa KM 50 Divonis Lepas, PUI: Keadilan Masih Hidup atau Sudah Mati?

Sekitar 50 anggota Persaudaraan Umat Islam (PUI) menggelar doa bersama di lokasi tragedi Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek, Jumat (27/3/2026). Di rest area yang telah ditutup permanen sejak 14 hari pascakejadian 7 Desember 2020, mereka mendoakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas tanpa kepastian keadilan.

Koordinator PUI, Sjahrir Jasim, menilai putusan lepas terhadap Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella sebagai simbol runtuhnya rasa keadilan publik. “Bagaimana kita bisa bicara soal keadilan, jika fondasi putusnya saja penuh masalah?” ujarnya.

Ia menyoroti putusan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian, namun tetap dilepaskan dengan alasan pembelaan diri. “Perbuatannya dinyatakan terbukti, tetapi tidak dihukum. Lalu di mana letak keadilannya?” tegasnya.

Keraguan publik, menurutnya, semakin menguat setelah hakim yang



menangani perkara justru tersandung kasus hukum. Hakim ketua tingkat pertama Muhammad Arif Nuryanta menjadi tersangka dugaan suap, sementara hakim agung Gazalba Saleh terjerat kasus gratifikasi.

Sjahrir juga menilai ada inkonsistensi dalam putusan. Jaksa telah membuktikan unsur Pasal 338 KUHP dengan tuntutan enam tahun penjara, namun hakim menyimpulkan adanya pembelaan diri.

Ia menegaskan aksi doa bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk protes moral. PUI sebelumnya juga mendesak DPR dan Polri membentuk pansus serta mengusut ulang kasus KM 50 secara transparan, seraya menyoroti perbedaan penanganan dengan kasus lain, termasuk penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.

Eka Permadhi

Tambang Picu Bara Konflik Padang Batung

Konflik lahan antara warga dan PT Antang Gunung Meratus (AGM) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, kian meruncing. Persoalan yang berawal dari klaim lahan kini bergeser menjadi sengketa hukum yang melibatkan laporan saling berhadapan di Polda Kalimantan Selatan.

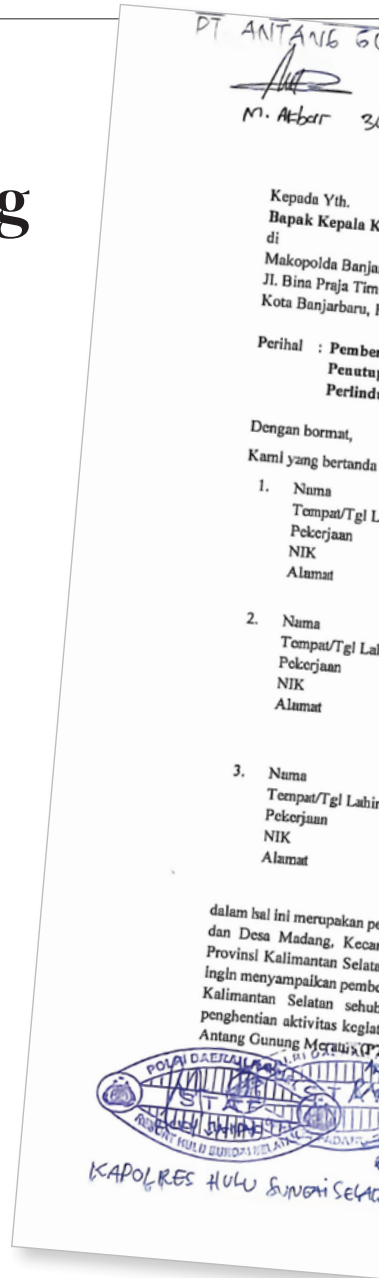
Sejumlah warga di Kecamatan Padang Batung melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Kalsel terkait rencana penghentian aktivitas tambang. Mereka menilai perusahaan telah beroperasi di atas lahan milik warga tanpa persetujuan.

“Kami sebagai pemilik lahan tidak pernah memberikan izin. Aktivitas penambangan sudah merusak tanaman karet yang menjadi sumber penghidupan masyarakat,” ujar Zainuddin, Kamis (2/4/2026).

Selain kerusakan lahan, warga juga menyoroti tidak adanya ganti rugi. “Seharusnya penyelesaian hak atas tanah dilakukan terlebih dahulu sebelum kegiatan penambangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya,” katanya.

Warga di Kecamatan Padang Batung, meliputi Desa Padang Batung, Kaliring, dan Madang, mulai menyuarakan keberatan secara terbuka. Mereka menilai aktivitas tambang telah memasuki lahan tanpa persetujuan, sekaligus merusak sumber penghidupan.

Merasa haknya diabaikan, warga kemudian mengambil langkah administratif dengan melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Kalimantan Selatan. Dalam surat tersebut, mereka menyampaikan rencana penghentian aktivitas tambang sekaligus meminta perlindungan hukum.



JALING MERATUS

0-03-2026



CAMAT PADANG BATUNG
A. NABHAN

Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Polisi Sektor, Palm Kecamatan Cempaka
Kalimantan Selatan 70732

Perintah Pelaksanaan Penghentian Kegiatan Penambangan dan
Pemukiman area Tambang oleh Masyarakat dan Permohonan
Penghapusan Hukuman

KADES PADANG BATUNG
100161

Daftar di bawah ini:

- : ZAINUDDIN
: Kuangan, Desa Kaliring, 04-06-1970
: Petani/Pekebun
: 6306020406700002
: Kuangan, RT 004 RW 002 Desa Kaliring, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- : RUSNA YUDA
: Hulu Sungai Selatan, 25-10-1958
: Pensiunan
: 6306056510580001
: Jl. Brig. Jend. H. Hasan Basri RT 004 RW 002 Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- : NORMAH
: Kaliring, 01-07-1971
: Mengurus Rumah Tangga
: 6306024107720100
: Kuangan Desa Kaliring RT 004 RW 002, Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

milik lahan/masyarakat Desa Padang Batung, Desa Kaliring
Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
dan (selanjutnya disebut sebagai "Masyarakat") dengan ini
diketahui kepada Bapak Kepala Kepolisian Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan dan penutupan area lokasi tambang PT
AGM yang terdapat di area lahan milik Masyarakat.



KAPOLDA KAL-SEL

Dipindai dengan CamScanner

foto: Dok. Aktual

Di sisi lain, perusahaan tetap mempertahankan posisinya. Kuasa hukum PT AGM, Suhardi, membantah seluruh tuduhan penyerobotan lahan dan menegaskan bahwa kegiatan operasional telah sesuai aturan.

"Kami membantah tuduhan dugaan penyerobotan lahan itu dan sudah melaporkan ke Polda Kalsel atas indikasi tindak pidana pemalsuan dokumen," ujarnya di Martapura, Kamis (2/4/2026).

Ia juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan. "Kami mengimbau masyarakat dan media tidak terburu-buru menyimpulkan permasalahan atas pemberitaan yang belum lengkap serta tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan," katanya.

Di tengah tarik-menarik itu, pengamat pertambangan Ahmad Husaini menilai persoalan ini harus dilihat secara utuh. Menurutnya, klaim kepemilikan lahan tidak cukup hanya disampaikan, tetapi harus dibuktikan secara hukum. "Kalau ada klaim lahan harus bisa dibuktikan secara hukum," ujarnya.

Kini, konflik tersebut berkembang dari sengketa individu menjadi gerakan warga, dan berujung pada proses hukum yang berjalan di Polda Kalimantan Selatan. "Peristiwa ini jelas melanggar.

Rizky

Gencatan Senjata Iran–AS–Israel Masih Rapuh

Kabar gencatan senjata antara Iran melawan blok Amerika Serikat–Israel menjadi sorotan utama dalam perkembangan terbaru konflik Timur Tengah. Setelah eskalasi militer sejak akhir Februari 2026, kesepakatan penghentian sementara serangan diumumkan sebagai upaya menahan perang agar tidak meluas.

Namun, implementasinya masih jauh dari solid. Dikutip dari Associated Press, Rabu (8/4/2026), kesepakatan itu langsung diuji di lapangan. AP mencatat bahwa “serangan baru tetap dilaporkan hanya beberapa jam setelah pengumuman”, menandakan situasi belum sepenuhnya terkendali.

Kesepakatan ini juga berkaitan dengan kepentingan global, khususnya energi. Dikutip dari The Washington Post, Rabu (8/4/2026), pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi bagian penting dalam

negosiasi, mengingat jalur tersebut merupakan jalur utama distribusi minyak dunia.

Di sisi lain, konflik tetap berlangsung di sejumlah titik. Reuters mencatat, Rabu (8/4/2026), Israel masih melanjutkan operasi militernya di luar cakupan perjanjian. “Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata,” demikian dilaporkan.

Peringatan Iran ke Negara Kawasan

Di tengah perkembangan tersebut, Iran mempertegas posisinya kepada negara-negara kawasan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengingatkan agar wilayah mereka tidak dijadikan pangkalan militer untuk menyerang Teheran.

“Kami telah berkali-kali mengatakan bahwa Iran tidak melakukan serangan pendahuluan, tetapi kami akan membalas dengan keras jika infrastruktur atau pusat ekonomi kami menjadi sasaran,” katanya, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (28/3/2026).

Ia juga menegaskan, “jangan biarkan musuh-musuh kita melancarkan perang dari tanah Anda.”

Pernyataan tersebut muncul setelah Iran melancarkan serangkaian respons militer sejak 28 Februari 2026, dengan target yang mencakup fasilitas militer dan jalur logistik di kawasan Teluk.

Andry Haryanto



Diplomasi Damai Iran–AS **Gagal**



Foto: reuters

Upaya diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan setelah perundingan selama 21 jam menemui jalan buntu. Pertemuan yang digelar di tengah gencatan senjata rapuh itu justru memperlihatkan kerasnya posisi Washington dalam mendorong tuntutan sepihak. Wakil Presiden AS JD Vance mengakui kegagalan tersebut.

“Kami datang dengan itikad baik, tetapi kami akan pulang tanpa kesepakatan,” ujar Vance, dikutip dari Reuters, Minggu (12/4/2026).

Media internasional menyoroti pendekatan Amerika Serikat yang dinilai terlalu menekan dan tidak memberi ruang kompromi. Delegasi Iran secara terbuka menyebut tuntutan Washington sebagai tidak proporsional dan sulit diterima dalam kerangka diplomasi.

“Tuntutan mereka berlebihan,” demikian pernyataan pejabat Iran, dikutip Reuters.

Tuntutan utama AS agar Iran memberikan komitmen tegas soal penghentian pengembangan nuklir dinilai tidak seimbang, karena tidak diiringi jaminan konkret bagi

Profil Diplomasi: Delegasi AS & Iran dalam Pertemuan Islamabad 2026

kepentingan Iran, termasuk pemulihan kepercayaan yang selama ini tergerus.

Ketegangan juga terlihat pada sejumlah poin lain yang ikut membekukan jalur negosiasi. Iran mengajukan pelepasan aset yang dibekukan, reparasi perang, serta pengakuan atas posisinya di Selat Hormuz.

Namun, Washington tetap mempertahankan pendekatan keras dengan memasukkan isu program rudal dan pengaruh regional Iran sebagai syarat tambahan. Dalam laporan The Guardian, sikap ini mempertegas bahwa Amerika Serikat tidak hanya menekan pada isu nuklir, tetapi juga berupaya memperluas cakupan tuntutan ke wilayah strategis lain yang sensitif bagi Teheran.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kebuntuan di Islamabad bukan semata akibat perbedaan teknis, melainkan akibat pendekatan diplomasi yang timpang.

Di satu sisi, Iran menuntut pengakuan atas kepentingannya, sementara di sisi lain, Amerika Serikat tetap memaksakan kerangka negosiasi yang berat sebelah. Kegagalan

diplomasi tidak hanya mencerminkan sulitnya kompromi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana tekanan Washington menjadi faktor dominan yang menghambat tercapainya kesepakatan.

Delegasi Amerika Serikat (AS)



JD Vance
Ketua Delegasi & Wakil Presiden

- Pemimpin utama negosiasi langsung, politisi Partai Republik dan mantan Senator Ohio yang menjadi tokoh kunci kebijakan luar negeri era Donald Trump (Lulusan Yale Law School & Ohio State University).



Steve Witkoff
Special Envoy (Utusan Khusus)

- Negosiator utama dan diplomat krisis yang menghubungkan kebijakan Trump, seorang pengusaha real estate yang berpengalaman dalam negosiasi Timur Tengah (Lulusan Hofstra University School of Law).



Jared Kushner
Senior Advisor

- Arsitek kebijakan Timur Tengah (Abraham Accords) yang bertanggung jawab atas strategi geopolitik dan hubungan regional (Lulusan Harvard University & New York University).

Fokus: Kekuatan politik-eksekutif dan strategi strategis.

Delegasi Republik Islam Iran



Mohammad Bagher Ghalibaf
Ketua Delegasi

- Representasi politik utama yang merupakan mantan komandan Garda Revolusi Iran dan mantan Wali Kota Teheran (Lulusan PhD Geografi Politik – Tarbiat Modares University).



Abbas Araghchi
Diplomat Utama

- Negosiator teknis senior yang dikenal sebagai arsitek perjanjian nuklir JCPOA (Lulusan PhD Ilmu Politik – University of Kent, Inggris).

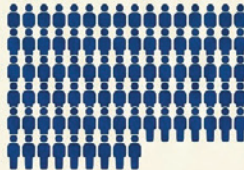


Esmail Baghaei
Spokesperson (Juru Bicara)

- Diplomat karier yang bertanggung jawab atas komunikasi resmi hasil negosiasi dengan latar belakang hubungan internasional.

Fokus: Kombinasi legitimasi politik, militer, dan teknokrasi.

Perbandingan Struktur & Fokus Delegasi



Skala Delegasi: AS (300)

AS membaa tim besar termasuk penasihat keamanan dan teknis.



Skala Delegasi: Iran (70)

Iran lebih ramping dengan fokus pada perwakilan politik, militer, dan ekonomi.

Fokus Strategis:

Delegasi AS mencerminkan tekanan politik-strategis, sedangkan Iran mengandalkan perpaduan legitimasi politik dalam negeri dan

Fokus Strategis:

Tekanan Politik vs Legitimasi Teknis
Iran mengandalkan perpaduan legitimasi politik dalam negeri dan keahlian diplomatik teknis.

Ringkasan Struktur Delegasi

Kategori	Amerika Serikat	Iran
Jumlah Personil	± 300 Orang	± 70 Orang
Unsur Utama	Politik-Eksekutif (VP & Penasihat Senior)	Politik-Militer & Diplomat Senior
Komposisi Tim	Penasihat Keamanan & Teknis	Pakar Politik, Militer, & Ekonomi
Mediator	Pakistan (Islamabad)	Pakistan (Islamabad)

Achmat

Solidaritas Tanpa Sekat: Umat Islam Mesti Bersatu dalam Naungan Persatuan

Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran kembali memicu eskalasi konflik di Timur Tengah yang semakin meluas. Dalam situasi ini, muncul kembali seruan agar umat Islam tidak terjebak pada sekat-sekat mazhab dan sekte, melainkan bersatu dalam sikap solidaritas terhadap sesama Muslim yang diserang.

Konflik yang memanas sejak akhir Februari itu telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, serta memicu aksi balasan dari Iran ke berbagai target militer dan strategis di kawasan. Bahkan, ketegangan terus meningkat dengan ancaman serangan lanjutan dari kedua belah pihak, termasuk terhadap fasilitas vital seperti energi dan transportasi.

Di tengah kondisi tersebut, narasi persatuan umat kembali menguat. Perbedaan mazhab yang selama ini kerap menjadi sumber konflik internal dinilai tidak relevan ketika umat Islam menghadapi ancaman eksternal yang nyata.

Al-Qur'an telah menegaskan pentingnya persatuan umat:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...^ص

“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai...”
(QS. Ali ‘Imran: 103)



Foto: yzm on Unsplash

Ayat ini menjadi landasan bahwa perpecahan bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga bentuk penyimpangan dari perintah ilahi. Dalam konteks konflik global, perpecahan internal justru melemahkan posisi umat Islam secara keseluruhan.

Sejumlah pihak menilai bahwa sikap terhadap Iran tidak seharusnya dilihat dari perbedaan teologis atau afiliasi mazhab, melainkan dari prinsip keadilan dan solidaritas terhadap pihak yang diserang. Dalam berbagai laporan, Iran menyatakan bahwa tindakan militernya merupakan bentuk respons terhadap agresi, bukan inisiatif perang.

Namun demikian, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Sebagian kalangan mengingatkan bahwa solidaritas tidak boleh bersifat emosional atau selektif, melainkan harus tetap mempertimbangkan kompleksitas geopolitik, termasuk kepentingan negara dan dampak konflik terhadap warga sipil.

Meski begitu, gagasan persatuan tanpa sekat tetap menjadi isu penting. Hadits Rasulullah SAW menegaskan batas minimal identitas seorang Muslim:

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ

الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ

“Barangsiapa yang shalat seperti shalat kita, menghadap ke arah kiblat kita dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah seorang muslim,

ia memiliki perlindungan dari Allah dan Rasul-

Nya. Maka janganlah kalian mengkhianati perlindungan Allah.”

(HR. Bukhari)



Hadits ini

menggarisbawahi bahwa perbedaan mazhab tidak bisa dijadikan dasar untuk menghapus status keislaman seseorang, apalagi dalam konteks solidaritas kemanusiaan.

Di tengah konflik global yang semakin kompleks, persatuan umat Islam tidak lagi sekadar wacana normatif, tetapi menjadi kebutuhan strategis. Tanpa kemampuan melampaui sekat-sekat internal, umat berisiko terus terpecah dan kehilangan daya tawar dalam percaturan dunia.

Dengan demikian, seruan untuk membela Iran dalam konteks ini bukan semata-mata persoalan politik, tetapi juga ujian bagi konsistensi umat Islam dalam menjalankan prinsip persaudaraan yang diajarkan agamanya.

Rizky Zulkarnain



IKUTI TERUS
DISKUSI PUBLIK BERBAGAI TOPIK TERKINI DAN MENARIK
HANYA DI:

aktual forum

Dialog Publik yang digelar setiap bulan secara hybrid (online dan offline)
di Channel YouTube aktualforum dan Cafe Warung Aceh Garuda (WAG)

Kolaborasi: 813-1019-7365

aktual.com | aktual forum
TEKANGAT TERPERCAYA

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM | YLBHI

- Komjen Pol Oegroseno (Mantan Wakapolri)
- Muhammad Isnur (Ketua YLBHI)
- Ifti (P)

MEMBEDAH PASAL KRUSIAL DI RUKHAP

aktualofficial | Aktual.com | Aktual Forum | aktual.com

aktual.com | aktual forum
TEKANGAT TERPERCAYA

KOCOK ULANG
KABINET PRABOWO

5 MENIT LAYAK
DIRESUME

- Nailul Huda (Direktur Ekonomi Celes)
- Ahmad Hojin (Program Pusat Puspoli)



Saksikan dan Ikuti Terus
Channel YouTube

aktualforum



Mengupas Berbagai Isu Terhangat dan Menjadi Perhatian Publik

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

Partnership/kolaborasi: 081310197365